

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA BAGI HASIL (DBH) DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP BELANJA DAERAH (Studi Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2012)

THE INFLUENCE OF DISTRICT ORIGINAL INCOME (PAD), GENERAL ALLOCATION FUND (DAU), REVENUE SHARING FUND (DBH) AND SPECIAL ALLOCATION FUND (DAK) FOR COST DISTRICT (Study at government of Jawa Barat 2011-2012)

¹Arda Rizki, ²Dini Hapsari

¹Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

²Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

¹ardarizki@students.telkomuniversity.ac.id, ²dinihapsari@telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Dalam UU No.32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda), Pemerintah Pusat (Pempus) akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Disamping dana perimbangan tersebut, pemda mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan.

Penelitian ini menggunakan deskriptif dan verifikatif. Populasi penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran provinsi Jawa Barat tahun 2011-2012. Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel jenuh dengan jumlah sebanyak 52 kota/kabupaten di provinsi Jawa Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari LRA provinsi Jawa Barat. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD, DAU, DBH, DAK secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Secara parsial PAD, DAU, DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Sedangkan DAK tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah.

Kata Kunci : Pendapatan asli daerah, Dana alokasi umum, Dana bagi hasil, Dana alokasi khusus, Belanja daerah.

Abstract

It is stated in 2004 Act No 32 about Regional Government that the implementation of regional government (Pemda) will get Central Government (Pempus) transferred balancing fund that consists of General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), and regional part of Revenue-sharing Fund (DBH) which consists tax and natural resources. Besides, government has its own independent fund which are District Original Income (PAD), funding, and other revenues.

This research is classified as a verifying-descriptive research. The population is Budget Realization Report (LRA) of West Java Province year 2011-2012. Saturation sampling method is used while secondary data from LRA of 52 municipalities/regencies are acquired. Analyzing methods used in this research are descriptive analysis and multiple linear regression.

The result shows that PAD, DAU, DBH, DAK significantly and simultaneously influence regional expenditure. PAD, DAU, DBH partially influences regional expenditure while DAK does not.

Keywords: District Original Income, General Allocation Fund, Revenue-sharing Fund, Special Allocation Fund, Regional Expenditure.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum di {8} tentang Pemerintah Daerah yang telah menggantikan UU No.22 Tahun 1999. Otonomi daerah disatu sisi memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah, namun disisi lain memberikan implikasi tanggung jawab yang lebih besar bagi pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam {8} disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda), Pemerintah Pusat (Pempus) akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Disamping dana perimbangan tersebut, pemda mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan.

Dana transfer dari pemerintah pusat seharusnya digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemda untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan penggunaan dana tersebut sudah seharusnya secara transparan dan akuntabel. Pada praktiknya transfer dana Pempus merupakan sumber dana utama Pemda untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari yang oleh Pemda “dilaporkan” di dalam perhitungan APBD {3}.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka daerah diberikan otonomi atau kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Adanya desentralisasi keuangan merupakan konsekuensi dari adanya kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri. Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran disektor publik maka mereka harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain dari pendapatan yang sah {4}.

Dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa alokasi PAD dan Dana Perimbangan terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran. Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti “**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA BAGI HASIL (DBH), DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP BELANJA DAERAH. (Studi kasus pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2012)**”.

1.2 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat?
2. Mengetahui bagaimana pengaruh secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat?
3. Mengetahui bagaimana pengaruh secara parsial Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, yaitu:
 - a. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah?
 - b. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah?
 - c. Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah ?
 - d. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah ?

1.3 Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif verifikatif yang bersifat kausal yang menguji pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH), dan dana alokasi khusus (DAK) terhadap belanja daerah sebagai variabel dependen. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran kota/kabupaten di provinsi Jawa Barat tahun 2011-2012, dengan jumlah sampel sebanyak 52 sampel. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH), dan dana alokasi khusus (DAK), sedangkan variabel dependennya adalah belanja daerah. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel jenuh.

Teknik analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda dengan 4 uji asumsi klasik. Berikut adalah persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini :

$$Y = a + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + e$$

Keterangan :

Y	= Belanja Daerah
A	= Konstanta
β_1 - β_3	= Koefisien regresi dari setiap variabel independen
X1	= Pendapatan Asli Daerah
X2	= Dana Alokasi Umum
X3	= Dana Bagi Hasil
X4	= Dana Alokasi Khusus
e	= Error

2. DASAR TEORI

2.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Menurut {2} Akuntansi Sektor Publik didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik serta swasta. Anggaran sebagai Alat Perencanaan.

2.2 Laporan Keuangan Sektor Publik

Menurut {8}, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan paragraf 28 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan SAP Berbasis Akrual dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam {4} laporan keuangan pemerintah (termasuk pemerintah daerah) terdiri atas berikut ini:

- Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- Laporan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
- Laporan Operasional (LO)
- Laporan Arus Kas
- Laporan Perubahan Ekuitas
- Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

{4} mendefinisikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

2.4 Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut {11} Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum yang berasal dari pemerintah pusat (dana APBN) dialokasikan untuk provinsi dan / atau kabupaten / kota.

2.5 Dana Bagi Hasil (DBH)

Menurut {11} Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi

2.6 Dana Alokasi Khusus (DAK)

{7} menjelaskan dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah atas dasar prioritas nasional dan kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu. Besaran DAK ditentukan setiap tahun dalam APBN.

3. PEMBAHASAN

3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Untuk mendeskripsikan variabel dalam penelitian ini, digunakan analisis statistik deskriptif yang dapat menyajikan penjelasan masing-masing variabel. Berikut adalah tabel mengenai statistik deskriptif variabel PAD, DAU, DBH, DAK dan Belanja Daerah.

Tabel 4.1
Hasil Statistika Deskriptif Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Daerah
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	52	45952391.99	1068548454.00	264969876.5725	257896452.19726
DAU	52	235862566.00	1672614142.00	841867423.0677	324273169.16340
DBH	52	51741910.99	446346684.00	158018483.5415	104460552.69563
DAK	52	1967400.00	167510030.00	69154716.3950	45926831.49500
BD	52	484464252.84	3674001336.00	1665060597.3862	748771733.53598
Valid N (listwise)	52				

Dari tabel statistik deskriptif yang telah ditunjukkan dapat diperoleh informasi bahwa hasil menunjukkan, dalam kurun waktu dua tahun, PAD memiliki nilai terendah (minimum) sebesar Rp 45.952.391,99 dan nilai tertinggi (maximum) Rp 1.068.548.454,00. Sementara rata-rata (mean) PAD berada pada nilai Rp 264.969.876,6 dengan standar deviasi sebesar Rp 257.896.452,2.

Dari tabel statistik deskriptif yang telah ditunjukkan dapat diperoleh informasi bahwa hasil pengolahan statistika deskriptif dari seluruh data sampel DAU. Hasil menunjukkan, nilai DAU terendah (minimum) adalah sebesar Rp 235.862.566,00 dan nilai tertinggi (maximum) adalah sebesar Rp 1.672.614.142,00. Sementara nilai rata-rata berada pada angka Rp 841.876.432,1 sedangkan standar deviasi berada pada angka Rp 324.273.169,2.

Dari tabel statistik deskriptif yang telah ditunjukkan dapat diperoleh informasi bahwa Hasil menunjukkan, nilai DBH terendah (minimum) adalah sebesar Rp 51.741.910,99 dan nilai tertinggi (maximum) adalah sebesar Rp

446.346.684,00. Sementara nilai rata-rata berada pada angka Rp 158.018.483,5 sedangkan standar deviasi berada pada angka Rp 104.460.552,7.

Dari tabel statistik deskriptif yang telah ditunjukkan dapat diperoleh informasi bahwa Hasil menunjukkan, nilai DBH terendah (minimum) adalah sebesar Rp 1.967.400,00 dan nilai tertinggi (maximum) adalah sebesar Rp 167.510.030,00. Sementara nilai rata-rata berada pada angka Rp 69.154.716,40 sedangkan standar deviasi berada pada angka Rp 45.926.831,49.

Dari tabel statistik deskriptif yang telah ditunjukkan dapat diperoleh informasi bahwa Hasil menunjukkan, dalam kurun dua tahun, belanja daerah terendah (minimum) sebesar Rp 484.464.252,84 dan nilai tertinggi (maximum) Rp 3.674.001.336,00. Sementara rata-rata (mean) berada pada nilai Rp 1.665.060.597,00 dengan standar deviasi sebesar Rp 748.771.733,5.

3.2 Pengujian Regresi Linear Berganda

Model regresi berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

$$\text{Belanja Daerah} = 12.712.957,212 + 1,212 \text{ PAD} + 1,334 \text{ DAU} + 1,173 \text{ DBH} + 0,336 \text{ DAK} + e$$

Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Nilai konstanta sebesar 12.712.957,212 artinya apabila nilai PAD, DAU, DBH, DAK bernilai nol, maka diasumsikan belanja daerah akan bernilai 12.712.957,212 (konstan).
- b. Variabel PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah dengan nilai koefisien 1,212 yang artinya setiap pertambahan 1% nilai PAD maka diasumsikan akan menaikkan nilai belanja daerah sebesar 1,212%.
- c. Variabel DAU berpengaruh positif terhadap belanja daerah dengan nilai koefisien 1,334 yang artinya setiap pertambahan 1% nilai DAU maka diasumsikan akan menaikkan nilai belanja daerah sebesar 1,334%.
- d. Variabel DBH berpengaruh positif terhadap belanja daerah dengan nilai koefisien 1,173 yang artinya setiap pertambahan 1% nilai DBH maka diasumsikan akan menaikkan nilai belanja daerah sebesar 1,173%.
- e. Variabel DAK berpengaruh positif terhadap belanja daerah dengan nilai koefisien 0,336 yang artinya setiap pertambahan 1% nilai PAD maka diasumsikan akan menaikkan nilai belanja daerah sebesar 0,336%

3.3 Pengujian Hipotesis

A. Uji Hipotesis secara simultan (Uji F)

Tabel 4.12
Uji Statistik F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4	6946275862144	403.798	.000 ^b
		8753000.000	688100.000		
1	Residual	47	1720236398909		
		79100.000	1044.000		
1	Total	51			
		6030000.000			

a. Dependent Variable: BD

b. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DBH, DAU

Dari uji ANOVA atau F test pada Tabel 4.12 didapat nilai Fhitung sebesar 403.798 dengan nilai signifikansi 0,000 dan nilai probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, H0 ditolak dan H1 diterima. Variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi belanja daerah atau dapat dikatakan bahwa PAD, DAU, DBH, dan DAK secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

B. Uji Koefisien Determinasi (R²)

C. Tabel 4.11

D. Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.986 ^a	.972	.969	131157782.800 30

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DBH, DAU

b. Dependent Variable: BD

Dari tampilan Tabel 4.15 menunjukkan besarnya adjusted R2 adalah 0,969, hal ini berarti 96,9% variasi belanja daerah dapat dijelaskan oleh variasi dari ke dua variabel independen PAD dan DAU. Sedangkan sisanya (100% - 96,9% = 3,1%) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model.

E. Uji Hipotesis secara parsial (Uji T)

Tabel 4.13
Uji Statistik t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	12712957.212	56558832.487		.225	.823
1 PAD	1.212	.122	.417	9.970	.000
DAU	1.334	.126	.578	10.551	.000
DBH	1.173	.292	.164	4.022	.000
DAK	.336	.787	.021	.427	.671

a. Dependent Variable: BD

Dari keempat variabel independen yang dimasukkan dalam regresi, variabel DAK tidak berpengaruh signifikan Karena nilai signifikansinya adalah 0,671 atau >0.05 sehingga DAK tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Sedangkan ketiga variabel independen yaitu DAU dengan signifikansi 0,000, DBH dengan nilai signifikansi 0,000 serta DAK dengan nilai signifikansi 0,000 atau < 0,05 dapat dikatakan bahwa ketiga variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel independen yaitu Belanja Daerah.

1. Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah

Hasil dari Tabel 4.13 menunjukkan bahwa nilai signifikansi PAD adalah sebesar 0,000 yaitu nilai signifikansi PAD berada dibawah 0,05 . Dari hasil uji t dapat dilihat bahwa B memiliki nilai positif, maka dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Artinya semakin besar PAD maka Belanja Daerah akan semakin besar pula. Begitu pula yang terjadi pada pemerintah provinsi Jawa Barat, semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula Belanja Daerah di provinsi Jawa Barat. Hal ini dapat dilihat dalam tabel statistik deskriptif yang menunjukkan dari tahun 2011 sampai dengan 2012 PAD mengalami peningkatan yang diikuti dengan kenaikan Belanja Daerah. Terdapat 14 sampel yang memiliki nilai PAD diatas rata-rata dan 38 sampel yang berada dibawah rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa PAD dalam kota/kabupaten di Jawa Barat kurang menggali potensi daerahnya sehingga PAD yang dihasilkan masih minim. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Nugraheni (2011), Srikandi (2012), Salampessy (2011), Mulyadi (2010), Sari (2014) bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah. Nilai koefisien PAD terhadap belanja daerah sebesar 1,219, artinya jika PAD mengalami pertambahan 1% maka belanja daerah diasumsikan akan meningkat sebesar 1,219% dengan asumsi variabel lain dalam kondisi konstan. Dengan demikian, hipotesis kedua yakni PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat dapat diterima.

2. Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah

Untuk nilai t DAU pada tabel 4.13 nilai signifikansi DAU adalah sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05. Dari hasil uji t dapat dilihat bahwa B memiliki nilai positif, maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Semakin tinggi DAU maka semakin tinggi pula Belanja Daerah. Hal ini sesuai dengan kondisi DAU provinsi Jawa Barat yaitu semakin tinggi DAU maka semakin tinggi pula Belanja Daerah di provinsi Jawa Barat. Hal ini dapat dilihat dalam tabel statistik deskriptif yang menunjukkan DAU semakin bertambah dari tahun 2011 ke tahun 2012 begitu pula yang terjadi dengan Belanja Daerah. Terdapat 25 sampel di Jawa Barat yang memiliki DAU diatas rata-rata dan 27 sampel berada dibawah rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah lebih banyak mengandalkan DAU untuk membiayai kegiatan pemerintahannya sehingga dapat dikatakan bahwa daerah belum mampu mendanai sendiri kebutuhan daerahnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yaitu Dana Alokasi Umum berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat dapat diterima

3. Dana Bagi Hasil secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

Untuk nilai t DBH pada tabel 4.13 nilai signifikan DBH adalah sebesar 0,000 atau dapat dikatakan nilai DBH kurang dari 0,005. Dari uji t dapat dilihat bahwa B memiliki nilai positif, maka dapat disimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah. Hal ini sesuai dengan kondisi DBH provinsi Jawa Barat yaitu semakin tinggi DBH maka semakin tinggi pula Belanja Daerah provinsi Jawa Barat. Hal ini dapat dilihat dari tabel statistik deskriptif jika DBH pada tahun 2011 dan 2012 mengalami peningkatan begitu pula dengan Belanja Daerah. Terdapat 20 sampel di Jawa Barat yang berada diatas rata-rata sehingga DBH kota/kabupaten di provinsi Jawa Barat dapat dikatakan berpengaruh dengan Belanja Daerah provinsi Jawa Barat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat yaitu Dana Bagi Hasil berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah kota/kabupaten di Jawa Barat dapat diterima.

4. Dana Alokasi Khusus secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

Untuk nilai t DAK pada tabel 4.13 nilai signifikan DAK adalah sebesar 0,617 atau dapat dikatakan nilai DAK lebih besar dari 0,05. Semakin besar DAK maka semakin besar pula Belanja Daerah. Dapat dilihat pada tabel statistik deskriptif bahwa ada beberapa sampel yang mengalami kenaikan dan ada pula yang mengalami penurunan di tahun 2011 sampai tahun 2012. Hal inilah yang menyebabkan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Daerah. Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah, karena kebutuhan sulit diperkirakan dengan rumus alokasi umum dan kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional. Namun pemerintah daerah yang menerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10% dari nilai DAK yang diterimanya untuk mendanai kegiatan fisik. Dana Pendamping tersebut wajib dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima yaitu Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah di kota/kabupaten di Jawa Barat ditolak.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan pengujian secara simultan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah di provinsi Jawa Barat periode 2011-2012. Hal ini dibuktikan berdasarkan uji F dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dibandingkan 0,05. Kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel Belanja Daerah sebesar 96,9% dan sisanya ($100\% - 96,9\% = 3,1\%$)
- b. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) mempunyai pengaruh berikut ini :
 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.
 2. Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.
 3. Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.
 4. Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Bastian, Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, Edisi Ketiga*. Bandung: Penerbit Erlangga.
- [2]Gregorius,N,Masdjojo dan Sukartono. (2009). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah serta Analisis Flypaper Effect Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2006-2008*. TEMA Vol 6 Edisi1. Maret 2009, 32-50.
- [3]Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [4]Halim, Abdul dan Mujib Ibnu. (2009) *Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Daerah*. Yogyakarta 1-101.
- [5]Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
- [6]Undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- [7]Undang-undang No 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.
- [8]Undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- [9]Undang-undang No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah.
- [9]Salampessy, Zulkarnain. (2011). *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah*. Jurnal Ekonomi dan Manajemen Vol 2 No 1 Oktober 2011.
- [10]Sari, Noni Puspita dan Yahya. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau*. Jurnal Akuntansi Universitas Sumatera Utara.
- [11]Sumardi dan Dwi Prasetyani. (2011). *Analisis Kinerja dan Potensi Pendapatan Asli Daerah*. Solo: Cakrabooks.